

Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *“Beberapa Masalah Hukum Tata Negara”*, Bandung, PT. Alumni.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2020, *“Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu”*, Cahaya Atma Pustaka.
- Hyronimus Rhiti, 2023, *“Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis”*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *“Teori-Teori Hukum”*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jatim.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram.
- Rahman Syamsuddin, 2019, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *“Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi”*, Setara Press, Prenadamedia Group, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2022, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Rajawali Pers, Depok.
- Tarmakiran S., 2005, *“Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum”*, Pionir Jaya, Bandung.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Jurnal

- Akhmad Khubby Ali Rohmat, Moh. Bagus, Siti Partiah, M. Habibi Royi Kholiqunnur, Mochammad Fauzi Ma'mal, 2022, *“Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Andi Dalaiya Sompia Ritimo, Musdalifah, 2023, "*Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Manggala Melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur*", Jurnal Administrasi Terapan, Volume 1, Politeknik STIA LAN Makassar.
- Angela Artha Tyara Ananda, 2024, "*Teori Positivime Hukum*", Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan S, 2021, "*Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*", Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 1.
- Devi Chintya Dewi, Dinda Amelia, Faizal Rakha Ratama, 2024, "*Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan dalam Era Digital di Indonesia*", Letterlijk Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1 Issue 2, Universitas Kuningan.
- Faissal Malik, 2021, "*Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 1.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Creipido, Volume 01, Nomor 01, Undip.
- M. Ikbar Andi Endang, 2018, "*Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*", Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 223 – 244.
- Miramur Permata Sari, Fitiah Hayati, Fitriani, 2022, "*Analisis Upaya Guru dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Khairani Aceh Besar*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 3, Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Naskur, 2008, "*Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Al-Syiriah, Vol. 6, IAIN Manado.
- Rio Admiral Parikesit, 2021, "*Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan*", Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sukadi, Muhammad Ihsan Mattalitti, Darwan Sari, La Ode Abdul Harlan, Wahyuddin & Abdul Rahman, 2024, "*Kepemimpinan Lurah dalam*

Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Lurah Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari”, Jounal Publicuho, Volume 7, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”. Jurnal Hukum Tata Negara, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953;

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, mengatur tata cara pelayanan Kelurahan dan Kemantren secara Elektronik. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 75;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 78.

Internet

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, hlm.1., Gramedia Blog/literasi/teorikepastianhukum, 2021, diakses 12 Maret 2025.

Pandu, Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli, hal. 6, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 12 Maret 2025.

Renata Christina Auli, SH, Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945, hal. 4, https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/_, diakses 12 Maret 2025.

Septian, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya”, hal.1, <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Surat%20keterangan%20ahli%20waris%20adalah,sebagai%20ahli%20waris%20yang%20sah>, diakses pada 15 Maret 2025.